



RINGKASAN

MIYA MULIYAWATI, Tinjauan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Bogor. *An Overview of Motor Vehicle Tax Collection In The Regional Revenue Agency Of The Province of West Java, Bogor Regency*. Dibimbing oleh MELA NURDIALY

Sumber pendapatan di daerah yang potensial yaitu penerimaan pajak daerah, yang memberikan kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan daerah salah satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor ini berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pemungutannya dikenakan kepada masyarakat wajib pajak dan badan sebagai penerimaan kewajiban di bidang perpajakan.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pajak sebagaimana di definisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Bapenda Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Bogor. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu *Official Assessment System* yaitu wajib pajak tidak diperlukan untuk menghitung pajak yang terhutang, dikarenakan sudah merupakan wewenang pemerintah dalam hal menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Bogor menggunakan dua prosedur yaitu Secara Langsung dan Online. Untuk Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dinilai sudah cukup efektif dilihat dari penerimaan pada tahun 2018 sampai 2019 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan pemungutan dan penagihan yang dilakukan oleh BAPENDA sudah baik hingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya sudah sesuai dan bertanggung jawab.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Bogor adalah suatu lembaga dari Pemerintah Daerah yang telah menepuh suatu perjalanan panjang tanpa terhindar dari pasang surut, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan ketika adanya wacana penggabungan Dinas Pendapatan dan Biro Keuangan, Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DT I Jawa Barat yang mempunyai salah satu fungsi tugas pemerintah dalam menghimpun, mencari sumber dana guna memenuhi pembiayaan dalam rangka kegiatan pemerintah Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

